



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

JAZ

JURNAL AKUNTANSI UNIHAZ



JAZ	VOLUME 6	NOMOR 2	BENGKULU, DESEMBER 2023	ISSN: 2620-8555
-----	----------	---------	-------------------------	-----------------

Penanggung Jawab	: Dr. Arifah Hidayati, S.E., M.M (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
Penanggung Jawab Redaksi	: Helmi Herawati, S.E., M.Si
Pimpinan Redaksi	: Helvoni Mahrina, SE., MM
Dewan Penyunting	: 1. Dr.Fachruzzaman, SE, MDM, AK, CA (Universitas Bengkulu) 2. Dr.Rini Indriani, SE, M.Si, Akt (Universitas Bengkulu)
Sekretariat	: Seftya Dwi Shinta, SE., M.Ak
Operator Web	: Winny Lian Seventeen, S.E., M.Ak
Alamat Redaksi	: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Jl.A.yani No 1 Kota Bengkulu. Tlp: (0736) 21536. Email: jazunihaz@gmail.com Web : https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jaz

MITRA BESTARI

No	Nama Reviewer	Perguruan Tinggi
1	Dr. DWI ERMAYANTI SUSILO, SE.MM	STIE PGRI Dewantara Jombang
2	Dr. Alistraja Dison Silalahi, SE., M.Si	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
3	Bambang Arianto, SE., M.Ak	STISIP Banten Raya
4	Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA., CRP., AWP., CPIA., QWP., CHRM., CADE., CTA.	Universitas Jember
5	Dwi Prastiyo Hadi. SE.M.Si	Universitas PGRI Semarang
6	Debbi Chyntia Ovami, S. Pd , M.Si	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
7	Decky Hendarsyah, S.Kom., M.Cs.	STIE Syariah Bengkulu

TIM EDITOR

No	Nama Editor	Perguruan Tinggi
1	Helmi Herawati, S.E., M.Si	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
2	Iwin Arnova, S.E., M.Ak	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
3	Helvoni Mahrina, S.E., M.M	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
4	Nina Yulianasari, S.E., M.Sc	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
5	Winny Lian Seventeen, S.E., M.Ak	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

DAFTAR ISI

<p>PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING TERHADAP MINAT BELAJAR MAHASISWA AKUNTANSI</p> <p>Ayu Pandansari¹, Mochammad Ilyas Junjuna², Binti Shofiatul Jannah³, Nur Ravita Hanun⁴, Ajeng Tita Nawangsari⁵, Aprilya Dwi Yandari⁶ <i>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya^{1,2,3,5}, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo⁴, Universitas Wiraraja Madura⁶</i> mij@uinsby.ac.id, aprilya@wirajaja.ac.id</p>	121 - 128
<p>ANALISIS SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) TERHADAP KETERSEDIAAN BAHAN BAKU PT HJ BUSANA INDAH</p> <p>Viki Lestari <i>Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi</i> vikilestari53@gmail.com</p>	129 - 140
<p>PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN PADA SPARE PART ALAT BERAT DI KOTA BENGKULU</p> <p>Dwi Sinta Cahyani¹, Helmi Herawati², Iwin Arnova³ <i>Fakultas Ekonomi Universitas Prof Dr. Hazairin, SH Bengkulu</i> Dwi.sinta01.ds@gmail.com¹, herawati77@gmail.com², iwinarnova89@gmail.com³</p>	141 - 151
<p>PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAKBADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI</p> <p>Yosi Safri Yetmi <i>Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang</i> ysyetmi@unis.ac.id</p>	152 - 164
<p>FINANCIAL KNOWLEDGE DAN GAYA HIDUP DALAM MENGUKUR FINANCIAL BEHAVIOUR GENERASI Z DARI PERSPEKTIF PENGGUNAAN MOBILE PAYMENT</p> <p>Gusi Putu estara Permana¹, Ni Putu Mita Adnyani², Kadek Wulandari aksmi P³ <i>Universitas Pendidikan Nasional, Bali</i> lestarapermana@undiknas.ac.id¹, mitaadnyani81@gmail.com², wulandarilaksmi@undiknas.ac.id³</p>	165 - 178
<p>PENINGKATAN NILAI PERUSAHAAN: PERAN KUNCI PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)</p> <p>Pirlo Putri Amiefa Noer¹, Aristanti Widyaningsih² <i>Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat</i> pirlo.putri@upi.edu¹, aristanti.widyaningsih@upi.edu²</p>	179 - 186

<p>ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PAD PROVINSI YANG ADA DI PULAU SUMATERA</p> <p>Winy Lian Seventeen¹⁾, Bunga Purnama Sari²⁾ <i>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu</i> wiseventeen@gmail.com¹⁾, bungapurnamasari1820@gmail.com²⁾</p>	187 - 193
<p>EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DANA PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) AFIRMASI PADA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DI KABUPATEN SELUMA</p> <p>Redho pebriansyah¹⁾, Fathul Hilal Perdana Kusuma²⁾, Helvoni Mahrina³⁾ <i>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Prof.Dr. Hazairin, SH Bengkulu</i> Redhofebriansyah@gmail.com¹⁾, fathul.hilal.5758@gmail.com²⁾, vonnbybkl@gmail.com³⁾</p>	194 - 203
<p>STUDI ITERATUR : FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT DIPENGARUHI OLEH AUDIT OPERASIONAL</p> <p>Mutiara Octaviani Yudiah¹⁾, Prilcilia Kartika²⁾, Carmel Meiden³⁾ <i>Institute Kwik Kian Gie, Jakarta</i> 0382202004@student.kwikkiangie.ac.id¹⁾, 0382202007@student.kwikkiangie.ac.id²⁾, carmel.meiden@kwikkiangie.ac.id³⁾</p>	204 - 210
<p>ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SD NEGERI GENTENG KOTA SUKABUMI</p> <p>Andari Wiji Utami¹⁾, Iqbal Noor²⁾ <i>Universitas Muhammadiyah Sukabumi</i> andariwiji123@gmail.com¹⁾, iqnoor@ummi.ac.id²⁾</p>	211 - 221
<p>DAMPAK PENTUPLE BOTTOM INE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)</p> <p>Elisa Ayu Febryanti¹⁾, Chyntia Dewi N.O²⁾, Qhuluqi Alya³⁾, Maria Yovita R. Pandin⁴⁾ <i>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya</i> 1222000080@surel.untag-sby.ac.id¹⁾, 1222000090@surel.untag-sby.ac.id²⁾, 1222000092@surel.untag-sby.ac.id³⁾, yovita_87@untag-sby.ac.id⁴⁾</p>	222 - 232
<p>PENGARUH DEBT TO ASSET RATIO DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA</p> <p>Hanna Andrea Era Prabandari¹⁾, Jaka Maulana²⁾ dan Cahyat Rohyana³⁾ <i>Universitas ogistik dan Bisnis Internasional Bandung</i> hanaandrea09@gmail.com¹⁾, maulanajaka06@gmail.com²⁾, cahyatrohyana@poltekpos.ac.id³⁾</p>	233 - 244
<p>ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGENDALIAN PERSEDIAAN BARANG (Studi Kasus Pada Toko Ponsel Twentyone Kota Sukabumi)</p> <p>Adinda Yasmine Putri Krisnadi¹⁾, Gatot Wahyu Nugroho²⁾ Idang Nurodin³⁾ <i>Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi</i> Adindayasmineputri1930611021@gmail.com¹⁾, gatotwahyunu2@gmail.com²⁾, idangnurodin@ummi.ac.id³⁾</p>	245 - 254

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PAD PROVINSI YANG ADA DI PULAU SUMATERA

Winy Lian Seventeen¹⁾, Bunga Purnama Sari²⁾

*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH*

wlseventeen@gmail.com¹⁾, bungapurnamasari1820@gmail.com²⁾

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the effectiveness of local taxes and levies on increasing PAD in the provinces of Sumatra Island. This type of research is qualitative with a descriptive analysis approach. The types of data are qualitative and quantitative data. The data analysis method used in this research is the Descriptive Analysis method. In addition, this study also uses quantitative analysis used in calculating the effectiveness of local taxes and local levies on increasing PAD. The results showed that out of 10 provinces, 9 provinces were categorized as very effective, while 1 province, Bengkulu, indicated an effective achievement although it did not exceed the target significantly at 93.29%. Research on the effectiveness of local retribution, there are 2 provinces with a very effective level of effectiveness, namely Aceh and South Sumatra. 3 provinces namely, Riau, Jambi and Lampung have an effectiveness level with a less effective category, while 5 other provinces have an effectiveness level with an ineffective category.

Keyword: local tax, local retribution, local revenue

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota yang juga setiap kabupaten/kota memiliki pemerintah daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah akhirnya otonomi daerah.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya.

Pulau Sumatera, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi nasional. Keberhasilan suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat bergantung pada ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pengembangan lainnya. Salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebagian besar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting dalam meningkatkan PAD dan membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Namun, meskipun potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Pulau Sumatera cukup besar, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan PAD. Adanya perbedaan kondisi sosial-ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta perbedaan dalam kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di setiap provinsi di Pulau Sumatera menjadi faktor yang dapat memengaruhi efektivitas sumber pendapatan ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk

menganalisis tentang efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di provinsi-provinsi Pulau Sumatera.

2. TINJAUAN PUSTAKA OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah merujuk pada kewenangan dan kemandirian yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Konsep ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait kebijakan lokal, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah setempat. Otonomi daerah mencakup aspek-aspek seperti pengaturan tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, dan pelaksanaan pembangunan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Beberapa tujuan dari otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para masyarakat.
- Bertujuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang didasari oleh demokrasi.
- Bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial kepada seluruh apisan masyarakat.
- Bertujuan untuk mewujudkan pemerataan daerah.
- Bertujuan untuk memelihara hubungan yang serasi dan baik. Hubungan yang dimaksud adalah antara pusat dan daerah. Selain itu, menjalin hubungan baik antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
- Bertujuan untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat.
- Bertujuan untuk menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas. Serta meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan peran juga fungsi dari pihak DPRD.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah.

Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

PAJAK DAERAH

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara angsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Siahaan dalam (Sabil, 2017) memberikan definisi pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan

tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara angsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

RETRIBUSI DAERAH

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pelayanan atau fasilitas yang disediakan kepada masyarakat atau badan usaha di wilayahnya. Pungutan ini bersifat timbal balik, artinya wajib bayar berdasarkan pemanfaatan atau penggunaan suatu ayanan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis retribusi daerah meliputi retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi izin usaha, dan berbagai jenis pungutan lain yang terkait dengan pelayanan atau fasilitas daerah. Menurut Windhu (2018: 185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara angsung. Menurut Yoyo (2017: 108) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH.

Efektivitas adalah tercapainya segala sesuatu yang sudah direncanakan. Efektivitas dapat pula diumpamakan sebagai penilaian kesuksesan dalam menggapai sasaran yang sudah ditetapkan (Ria, 2017). Efektivitas pajak daerah menandakan kesanggupan pemerintah daerah dalam menggalang pajak daerah berdasarkan jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan. Jadi efektivitas yang dimaksud ialah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu

EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH

Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. (Yuliasti dan Dewi, 2017)

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berbentuk uraian seperti gambaran umum, sejarah dan visi-misi serta data hasil wawancara sedangkan data kuantitatif adalah data realisasi serta data target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2022 di setiap provinsi di pulau. Sumber Data dari penelitian ini adalah data skunder yang di ambil dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu dokumentasi (*documentation*). Metode Analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis kuantitatif yang digunakan dalam menghitung efektivitas pajak daerah dengan menggunakan rumus sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2014):

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi kriteria nilai efektivitas pajak daerah

Keterangan	Persentase
Sangat efektif	> 100 %
Efektif	90 – 100 %
Cukup efektif	80 – 90 %
Kurang efektif	60 – 80 %
Tidak efektif	< 60%

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (dalam Puspitasari, 2014)

Kemudian untuk menghitung tingkat efektivitas Retribusi daerah dapat dihitung sesuai dengan rumus dalam penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2014) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi kriteria nilai efektivitas Retribusi daerah

Keterangan	Persentase
Sangat efektif	> 100 %
Efektif	90 – 100 %
Cukup efektif	80 – 90 %
Kurang efektif	60 – 80 %
Tidak efektif	< 60%

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (dalam Puspitasari, 2014)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Sumatera, yang merupakan pulau terbesar keenam di dunia, terletak di barat Indonesia dan memiliki luas sekitar 473,481 kilometer persegi. Pulau ini memiliki keberagaman geografis, budaya, dan ekonomi yang memadukan potensi alam dan keragaman suku bangsa. Terletak di antara Samudra Hindia dan Selat Malaka, Pulau Sumatera memiliki sejumlah keunggulan yang menciptakan daya tarik tersendiri.

10 Provinsi di Pulau Sumatera:

1. Aceh: Terletak di ujung utara Pulau Sumatera, Aceh terkenal dengan keindahan alamnya dan warisan budaya yang kental, termasuk rumah tradisional Aceh dan tradisi kopi Gayo.
2. Sumatera Utara: Ibukota: Medan. Terkenal dengan Danau Toba, Sumatera Utara juga memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang mencakup situs-situs Batak.
3. Sumatera Barat: Ibukota: Padang. Dikenal dengan rumah gadang dan masakan rendang, Sumatera Barat memiliki keindahan alam seperti Danau Maninjau dan Ngarai Sianok.
4. Riau: Ibukota: Pekanbaru. Provinsi ini merupakan pusat industri minyak dan gas, serta memiliki taman nasional yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna.
5. Jambi: Ibukota: Jambi. Jambi terkenal dengan taman nasionalnya yang indah, seperti Taman Nasional Bukit Duabelas.
6. Sumatera Selatan: Ibukota: Palembang. Sumatera Selatan memiliki kekayaan budaya dan sejarah, termasuk masakan khas Palembang dan tempat-tempat bersejarah.
7. Bengkulu: Ibukota: Bengkulu. Bengkulu terkenal dengan benteng kolonialnya dan keindahan pantai seperti Pantai Panjang.
8. Lampung: Ibukota: Bandar Lampung. Lampung dikenal dengan kebudayaan tradisionalnya, seperti Tari Pendet dan pemandangan indah Pulau Pahawang.

9. Kepulauan Bangka Belitung: Ibukota: Pangkal Pinang. Terkenal dengan tambang timahnya dan keindahan pantainya, seperti Pantai Tanjung Tinggi.
10. Kepulauan Riau: Ibukota: Tanjung Pinang. Provinsi ini memiliki keindahan alam dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah Selat Malaka.

Keunggulan Pulau Sumatera:

1. Kekayaan Alam: Pulau Sumatera memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk hutan hujan tropis, gunung berapi, dan pantai-pantai yang indah.
2. Keanekaragaman Budaya: Setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, dan tradisi yang memberikan warna khas tersendiri.
3. Pariwisata: Keindahan alam, warisan sejarah, dan budaya yang kaya membuat Pulau Sumatera menjadi destinasi pariwisata yang menarik.
4. Potensi Ekonomi: Pulau Sumatera memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, dan industri.
5. Keunikan Tradisional: Rumah Gadang, Tari Piring, dan tradisi-tradisi unik lainnya memberikan identitas tradisional yang membedakan Pulau Sumatera dari pulau-pulau lainnya di Indonesia.

Efektivitas Pajak Daerah.

Data Pajak Daerah di Pulau Sumatera pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio Efektivitas pajak daerah

Provinsi	Target*	Realisasi*	Rasio Efektivitas	Keterangan
Aceh	1.540,10	1.717,83	111,54%	Sangat Efektif
Sumatera Utara	6.227,77	6.464,50	106,72%	Sangat Efektif
Sumatera Barat	2.014,44	2.274,50	112,91%	Sangat Efektif
Riau	3.600,42	4.054,92	112,63%	Sangat Efektif
Kepulauan Riau	1.150,22	1.491,81	129,78%	Sangat Efektif
Jambi	1.507,60	1.871,84	124,16%	Sangat Efektif
Bengkulu	786,03	733,27	93,29%	Efektif
Sumatera Selatan	3.680,90	4.461,15	121,20%	Sangat Efektif
Bangka Belitung	698,20	735,29	105,31%	Sangat Efektif
Lampung	2.678,86	3.126,14	116,70%	Sangat Efektif

*dalam Miliar Rupiah

Berdasarkan data efektivitas target dan realisasi pajak daerah pada berbagai provinsi di Pulau Sumatera, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Provinsi Sangat Efektif

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik, bahkan melebihi target. Ini menandakan bahwa pengelolaan pajak daerah di provinsi-provinsi tersebut berjalan sangat efisien dalam mencapai tujuan pendapatan.

2. Provinsi Efektif

Bengkulu menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 93,29%, mengindikasikan pencapaian yang efektif meskipun tidak melebihi target secara signifikan.

Kesimpulan ini memberikan gambaran positif mengenai kinerja pengelolaan pajak daerah di Pulau Sumatera. Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera secara umum menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam mencapai target pendapatan pajak daerah. Evaluasi dan penerapan kebijakan yang tepat dapat diterapkan di provinsi-provinsi lain untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah dan mendukung pendapatan daerah secara berkelanjutan..

Efektivitas Retribusi Daerah.

Data retribusi Daerah di Pulau Sumatera pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio Efektivitas Retribusi daerah

Provinsi	Target*	Realisasi*	Rasio Efektivitas	Keterangan
Aceh	9,07	15,00	165,30%	Sangat Efektif
Sumatera Utara	68,42	28,95	42,32%	Tidak Efektif
Sumatera Barat	26,80	12,60	47,00%	Tidak Efektif
Riau	23,26	16,68	71,74%	Kurang Efektif
Kepulauan Riau	69,99	6,84	9,77%	Tidak Efektif
Jambi	24,72	16,87	68,22%	Kurang Efektif
Bengkulu	5,77	3,11	54,03%	Tidak Efektif
Sumatera Selatan	11,67	12,19	104,42%	Sangat Efektif
Bangka Belitung	21,68	5,11	23,57%	Tidak Efektif
Lampung	8,42	6,60	78,37%	Kurang Efektif

*dalam Miliar Rupiah

Berdasarkan data efektivitas target dan realisasi retribusi daerah pada berbagai provinsi di Pulau Sumatera, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Provinsi Sangat Efektif
Aceh dan Sumatera Selatan menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik, bahkan melebihi target. Ini menandakan bahwa kinerja pengelolaan retribusi daerah di kedua provinsi ini sangat efektif dalam mencapai tujuan pendapatan.
2. Provinsi Kurang Efektif
Riau dan Lampung menunjukkan tingkat efektivitas kurang efektif karena realisasi belum mencapai target secara optimal. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan strategi untuk meningkatkan pencapaian target.
3. Provinsi Tidak Efektif
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Bangka Belitung menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah, menandakan kinerja pengelolaan retribusi daerah yang perlu segera diperbaiki.
Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebab rendahnya efektivitas retribusi daerah di beberapa provinsi. Faktor-faktor seperti kebijakan pungutan, kesadaran masyarakat, serta efisiensi administrasi perlu dievaluasi untuk merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi daerah di setiap provinsi. Kesimpulan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan stakeholders terkait untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN**KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis efektivitas target dan realisasi retribusi daerah serta pajak daerah di berbagai provinsi di Pulau Sumatera, dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa provinsi menunjukkan kinerja yang sangat efektif dalam mencapai target pendapatan, sementara provinsi lainnya perlu upaya lebih intensif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi dan pajak daerah. Provinsi seperti Aceh, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau menonjol sebagai contoh efektivitas yang tinggi, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, provinsi-provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Bangka Belitung menunjukkan tingkat efektivitas yang masih rendah, memerlukan evaluasi dan strategi perbaikan yang lebih cermat. Kesimpulan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan.

SARAN

Berikut adalah saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan terhadap efektivitas target dan realisasi retribusi daerah serta pajak daerah di berbagai provinsi di Pulau Sumatera:

1. Provinsi yang Sangat Efektif
Aceh, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau: Disarankan untuk terus mempertahankan kebijakan yang telah berhasil dan memperkuat sistem pengawasan guna mencegah potensi penyimpangan atau penyalahgunaan.
2. Provinsi yang Kurang Efektif
Riau dan ampung: Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap strategi pengelolaan retribusi daerah. Mungkin diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, penyempurnaan kebijakan, dan pelibatan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan realisasi.
3. Provinsi yang Tidak Efektif
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung: Rekomendasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan retribusi daerah dan pajak. Perlu dipertimbangkan pembenahan kebijakan pungutan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan efisiensi administrasi untuk meningkatkan efektivitas.
4. Provinsi Efektif Namun Perlu Pemantapan:
Bengkulu: Meskipun efektif, disarankan untuk terus memantapkan keberhasilan yang sudah dicapai dan memperhatikan potensi perbaikan kecil untuk meningkatkan efisiensi.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat membantu setiap provinsi di Pulau Sumatera untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi daerah dan pajak daerahnya, dengan fokus pada peningkatan efektivitas, efisiensi administrasi, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pungutan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2016. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Mardiasmo, 2018. Akuntansi sektor publik, Andi: Yogyakarta.
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Putra, Windhu. 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. PT Rajagrafindo. Persada. Depok
- Ria, Mesriah. 2017. Pengertian dan Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas. <http://www.jejakakuntansi.net/2017/10/pengertian-dan-perbedaan-efisiensidan.html?m=1>. 5 Oktober 2017.
- Sudaryo, Yoyo, et. all. 2017. Keuangan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi.